

رسالة **RUSALAH**

RUU SISDIKNAS KENAPA DITENTANG?



SIDDIQ AMIEN:
OH...IRAK



BUNGA BANK
HARAM?

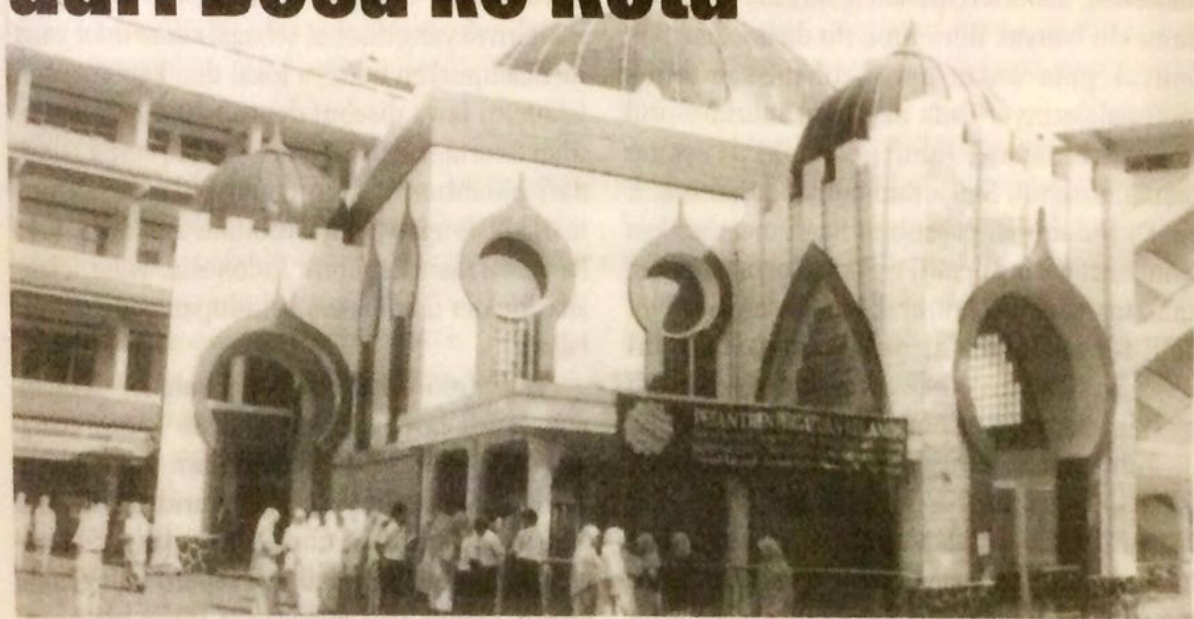


JEJE JAENUDIN:
KUNCI SURGA





Pesantren: dari Desa ke Kota



*D*alam sebuah surat kepada Pimpinan DPR RI, Pimpinan Pusat Persatuan Islam menyatakan: "Mendesak agar keberadaan Pondok Pesantren diakomodasikan pula dalam UU ini". Sebelum pernyataan itu, surat bertitimpangsa 28 Muharram 1424 H/31 Maret 2003 M itu menyayangkan jika terjadi suatu "peng-anak tiri-an" kepada Madrasah dan Pondok Pesantren di negeri ini. Pertanyaannya kemudian, "Mengapa Pesantren di-anak tiri-kan?" Di sinilah perlunya penelusuran secara agak antropologis tentang timbul tenggelamnya pesantren – secara umum—di Indonesia.



M. TAUFIQ RAHMAN

Pesantren' yang berarti 'tempat santri' merupakan institusi pendidikan Indonesia di mana murid (santri) mempelajari pelajaran Islam klasik dan berada di dalam kehidupan komunal Islam orthodox. Ia disebut juga 'pondok' (Arab: *funduq*) yang bermakna

'tempat menginap' (*Encyclopaedia of Islam*, 1995: 295). Berarti, pesantren adalah 'sekolah Islam menginap'.

Pada mulanya seorang ulama yang kharismatik menyiarkan agama di Mesjid atau di rumahnya. Namun, dengan cara gradual, kegiatan keislaman bermetamorfosis menjadi



KAJIAN UTAMA

madrrasah diniyyah, dan yang terakhir menjadi pesantren. Hal itu disebabkan banyaknya permintaan dari masyarakat Muslim berbagai kalangan untuk dibimbing sang ulama. Demikianlah maka Mesjid atau rumah saja tidak cukup. Untuk anak-anak yang sudah bisa baca al-Qur'an, ilmu-ilmu keagamaan lain perlu diajarkan, maka terciptalah madrasah diniyyah. Semakin banyak ilmu-ilmu itu dicari, semakin banyak pula waktu untuk dihabiskan untuk mempelajarinya. Pada akhirnya murid-murid itu ikut numpang tidur (mondok) di sekitar ulama tersebut. Maka muncullah pesantren.

Di Indonesia, pesantren telah memberikan sumbangan yang berarti terhadap pembentukan karakter spiritual, kultural, sosial, dan ekonomi kehidupan Islam di desa hingga hari ini (Frederick Denny, 1995: 296). Ia telah menjadi pusat pertahanan pribumi Muslim melawan pengaruh Belanda dengan keimanan dan tatanan Islam di pedesaan. Namun, nampaknya setelah kemerdekaan, telah terjadi pergeseran dari institusi tertutup kepada kehidupan yang lebih terbuka dan kooperatif. Di sini fungsi pesantren adalah sebagai pusat budaya (*cultural center*), yaitu budaya Islam yang menjadi budaya-tandingan (*counter-culture*) terhadap apa yang ada di sekelilingnya. Maka disebutlah sang ustadz pemimpin pesantren itu sebagai 'agen budaya' (*cultural broker*) (Wahid, 1995: 47).

Biasanya, pesantren dibangun di tempat yang tidak ramai di dekat desa atau dalam bagian yang terpisah dari lokasi penduduk. Walaupun demikian, itu tidak berarti jauh dari masyarakat, karena posisi ulama itu sendiri memang dimanfaatkan untuk membina masyarakat sekitar, untuk pengajaran Islam ataupun untuk membantu mengobati (*healing*). Sementara masyarakat itu sendiri seringkali membantu, terutama bantuan finansial terhadap pesantren. Dengan demikian, walaupun terpisah secara lokasi, pesantren dan penduduk di sekitarnya mempunyai suatu kerja sama yang

baik.

Pembangunan pesantren yang jauh atau memisahkan diri dari masyarakat itu nampaknya hanya untuk mengkonsentrasikan pembinaan ilmu dan amalan Islam di bawah bimbingan sang ulama. Memang amat dirasakan kehidupan yang serba-Islam di pesantren, berbanding dengan kebanyakan orang di sekitarnya yang disebut sebagai *kaum adat* yang mencampurkan budaya lokal dan kepercayaan Islam (di Jawa disebut dengan *kaum abangan*, lihat Geertz, 1960: 5-7). Kehidupan serba Islam dari pesantren itupun dapat pula dikonfrontasikan dengan Pemerintahan Belanda dan Pemerintahan Republik Indonesia, yang jelas-jelas bukan merupakan kehidupan yang serba-Islam.

Pesantren tidak boleh dipisahkan dengan ustadz (di Jawa disebut dengan *kyai*), yang menjadi pendiri, pengurus dan guru yang absolut. Kepadanyalah para murid mengikuti dan melayani, baik untuk kepentingan ilmu ataupun untuk yang lainnya seperti mengelola sawah, kebun, dan sebagainya (yang biasanya menjadi milik sang ustadz) atau mencari sumbangan/wakaf. Ustadz pemimpin pesantren biasanya adalah orang setempat yang kembali dari belajar Islam di luar negeri, terutama di negara-negara Timur Tengah seperti Saudi Arabia atau Mesir dan kemudian menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat kampung yang penduduknya belum memeluk agama Islam atau belum sepenuhnya menjalankan syari'at Islam (Lihat Sukamto, 1999:41). Sedemikian diakuinya otoritas sebagai pemimpin agama, sehingga kepercayaan masyarakatnya betul-betul absolut kepadanya. Tidak heran jika masyarakat memohon bimbingan spiritual, pengobatan, dan bahkan menitipkan anak mereka untuk dibina siang-malam olehnya.

Ustadz yang berkharisma inilah yang kemudian menetapkan kurikulum pengajaran Islam, kitab-kitab yang dipakai, dengan cara-



cara yang beliau sendiri tetapkan. Walaupun seringkali pesantren merosot ketika sang ustadz besar meninggal, namun terkadang itu bertahan atau lebih berkembang lagi di tangan penggantian, terutama keturunannya termasuk murid-murid yang menikahi anak-anak ustadz dan meneruskan tradisinya.

Dari paparan di atas dapatlah ditetapkan bahwa terdapat dua cara untuk menjadi ustadz, secara perolehan hasil belajar (*achievement*) (Lihat Gilson, 1982:32; Humphreys, 1995:187) dan secara keturunan (*ascription*) (Bruinessen, 1998:182; Sobary, 1998:128), walaupun tentu saja keturunannya itupun perlu banyak belajar terlebih dahulu, yang boleh jadi lebih diutamakan oleh orang tua mereka dibandingkan dengan santri lainnya.

Kemudian, dibandingkan dengan *madrasah* (sekolah agama modern) dan *sekolah* (sekolah modern peninggalan Belanda yang diadaptasi pemerintah Indonesia), pesantren berkarakter sebagai institusi yang hampir total. Ia merupakan institusi pendidikan formal dan informal sekaligus. Walaupun para murid bebas untuk datang dan pergi, dan walaupun kurikulum dapat diakses langsung secara privat kepada ustadz atau para asistennya, namun pesantren adalah cara hidup 24 jam per hari, dengan pengajian ba'da Subuh, ba'da 'Asar, ba'da Magrib, dan ba'da Isya, bekerja di sawah/kebun atau sekolah, istirahat untuk olahraga dan berbagai aktivitas individual untuk makan dan mengurus-diri.

Pesantren biasanya tidak memungut bayaran atau sangat minimal sekali jikapun mengumpulkan uang dari murid. Hidupnya pesantren biasanya dari usaha sawah atau kebun. Selebihnya biasanya dari sumbangan masyarakat sekitarnya. Demikianlah maka pesantren boleh dikatakan telah memberikan pendidikan tentang kemandirian, baik kepada murid-muridnya ataupun kepada masyarakat. Ia merupakan contoh dari masyarakat yang

mandiri (*self-reliant society*).

Murid-murid pesantren adalah mereka yang berumur dua belas hingga dua puluh satu tahun. Mereka diwajibkan untuk mandiri. Murid-murid yang lebih tua diwajibkan membimbing mereka yang lebih muda. Secara umum santri ditempatkan agak jauh dari pimpinan pesantren. Sang pimpinan dimohon untuk membantu dan intervensi hanya apabila para murid mendapat masalah khusus dan sangat penting.

Kurikulum pesantren selalu berpusat pada al-Qur'an—baik membaca ataupun menafsirkannya— dan teks-teks berbahasa Arab mengenai hadits, fiqh, aqidah, akhlak, nahu-saraf (gramatika Bahasa Arab), balaghah (retorika), tasawuf, teks-teks do'a dan pujipujian (Bandingkan dengan Dhofier, 1994). Buku-buku teks pesantren biasanya disebut dengan 'kitab kuning' karena biasanya dicetak dengan kertas berwarna agak oranye. Pesantren yang lebih modern biasanya sudah menggunakan buku putih.

Walaupun dulunya tidak jelas peringkat-peringkat di dalam sistem pembelajaran pesantren, namun kini sudahnya terdapat peringkat-peringkat tersebut, yaitu *Ibtida'iyah* (dasar), *Tsanawiyah* (pertengahan), dan *Aliyah* (tinggi). Namun, kebanyakannya, *Ibtida'iyah* tidak diutamakan, sehingga, kini pesantren ini hanya menerima lulusan SD dan memasukkannya pada peringkat *Tajhiziyah* (persiapan untuk memasuki *Tsanawiyah*).

Alumni dari pesantren biasanya bekerja pada institusi-institusi yang berkait-erat dengan keagamaan, misalnya menjadi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) yang menangani masalah perkawinan, perceraian, dan lain-lain, atau menjadi pegawai Pengadilan Agama, menjadi guru atau dosen pada institusi pendidikan agama seperti madrasah atau perguruan tinggi Islam. Namun ada pula yang menjadi pegawai atau pemimpin pemerintahan seperti menjadi



KAJIAN UTAMA



lurah, camat, bupati ataupun menjadi wakil rakyat pada Parlemen peringkat Daerah (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah -DPRD). Yang tak kalah pentingnya adalah banyaknya alumni yang kemudian mendirikan pesantren di tempat tinggal mereka. Demikianlah, dengan penyebaran alumni ini nampak bahwa pesantren telah memberikan semacam ijazah untuk menjadi orang yang mempunyai otoritas dalam bidang keagamaan.

Namun, kini pesantren sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat yang lebih memilih menitipkan anaknya di madrasah (pendidikan Islam yang tidak mempunyai ustadz yang berotoritas dan tidak mempunyai disiplin kehidupan Islam 24 jam per hari) atau di sekolah (pendidikan sekular dengan hanya 10% pelajaran agama) yang secara berangsur telah menjadi pendidikan publik yang universal di Indonesia (Lihat Steenbrink, 1986:97).

Demikianlah, jika tidak terdapat penyesuaian terhadap kemodernan, pesantren nampaknya akan tertinggal, karena di sekelilingnya sudah terdapat banyak pembangunan dengan berbagai sektor yang mungkin tidak lagi dapat diantisipasi oleh pesantren, yang berasal dari tradisi pertanian (*rural culture*) itu. Pendi-

dikan pesantren yang tidak adaptif terhadap perkembangan zaman hanya akan berbentuk pendidikan ulama yang sifatnya hanya menjadi komplemen pada pendidikan nasional secara umum. Demikian pendapat Taufik Abdullah (1986:102), yang nampaknya menunjukkan gambaran yang mendekati realitas sebenarnya dalam keadaan di Indonesia.

Oleh karena itu, penulis mempunyai beberapa kritik dan saran untuk pesantren.

Dari segi ilmu, pesantren nampaknya hanya menumpukan pandangan bahwa yang disebut ilmu itu adalah ilmu agama. Memang hal ini merupakan tantangan kepada budaya masyarakat sekeliling yang berpendapat bahwa yang disebut ilmu itu adalah ilmu umum saja. Tetapi, jika orang biasa katakan kepada pendidikan non-pesantren (terutama sekolah) sebagai pendidikan ilmu sekular, maka sebaliknya pesantren juga merupakan tempat pendidikan ilmu sekular pula, karena arti dari sekular adalah pemisahan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Maka jika pesantren hanya melulu memikirkan kehidupan akhirat saja, itu pun telah pula menjadi sekular. Dengan demikian, diperlukan adanya pandangan penyatuan (integrasi) ilmu: antara ilmu-ilmu keagamaan



dan ilmu-ilmu keduniaan. Apa yang terjadi pada pesantren dulu adalah bukannya institusi pendidikan yang melulu agama, karena terdapat pendidikan keduniaan dengan pengajaran bercocok tanam dan berkebun secara praktek langsung. Tradisi inilah yang hilang pada masa kini. Murid-murid sekarang sudah tidak lagi berminat pada masalah pertanian, sehingga hidup di pesantren hanyalah menuntut ilmu agama. Apa yang perlu dilakukan kemudian, dengan integrasi ilmu agama-dunia itu—yang sebenarnya sudah diterapkan pada pesantren dulu itu—adalah pengembangan ilmu-ilmu dunia itu menjadi lebih maju lagi. Pengajaran ilmu-ilmu dunia dengan mengikuti perkembangan zaman itu, diyakini akan dapat merangsang para murid untuk menggeluti keilmuan tersebut. Dan integrasi ilmu pun terjadilah.

Dengan demikian, nampaknya diperlukan adaptasi pesantren yang berasal dari budaya pedesaan (*rural culture*) kepada budaya perkotaan (*urban culture*). Demikian ini karena perkotaan dengan kehidupan modernnya pun adalah pula lahan dakwah Islam yang perlu digeluti. Sementara, apabila kemampuan para santri hanya dalam bidang pertanian dan bercocok tanam, nampaknya mereka akan mendapat kesusahan untuk hidup di perkotaan. Dengan demikian, diperlukan adanya pendidikan dan keterampilan yang berasal dari kemodernan seperti pembelajaran komputer, administrasi, akuntansi, pendidikan kewartawan (jurnalistik) dan sebagainya di lingkungan pesantren.

Kemudian dalam masalah administrasi, pesantren yang berasal dari budaya transmisi pengetahuan secara dari mulut ke mulut (*oral tradition*), terkesan sangat kurang rapi, karena tidak terdokumentasi. Pesantren sangat kekurangan budaya tulis (*literal tradition*), termasuk dalam hal pembelajaran. Selama ini berbagai peraturan ataupun pengurusan bertumpu

kepada perorangan, tidak secara kelembagaan dengan hukum-hukum yang tertulis. Ketiadaan administrasi yang rapi ini akan mengakibatkan kesalahfahaman berbagai pihak karena tidak ada pegangan yang dipedomani bersama. Oleh karena itu, disarankan kepada pihak pengurus pesantren dan para asatidz untuk selalu bermusyawarah yang kemudian menghasilkan berbagai aturan dan administrasi yang disepakati dan dijalankan dengan baik.

Dari segi kepemimpinan, kaderisasi memang merupakan hal yang agak sukar dilakukan, apabila hendak mencari pengganti-pengganti yang sempurna, apalagi dengan anggapan bahwa kemampuan untuk mengurus pesantren bukan hanya mengandalkan kemampuan memahami ilmu-ilmu agama Islam yang berdasarkan pada kitab-kitab klasik saja. Pesantren memerlukan pemimpin-pemimpin yang mampu mengurus berbagai hal. Demikian itu karena pesantren adalah merupakan masyarakat mini (*surat al-musagharat*). Berbagai urusan dengan berbagai perkara ada di sini. Oleh karena itu, disarankan untuk dilakukan kaderisasi yang sesuai dengan kemampuan para kader. Dengan demikian, pada masa datang kepemimpinan pesantren tidak lagi individual yang monolitik (berujung pada satu orang saja), tetapi kepemimpinan yang kolektif.

Demikianlah kesimpulan yang didapati dari pengalaman dan pengamatan tentang kepesantrenan, baik tradisional maupun modern. Apa yang pasti dari pesantren ini, dibalik kekurangan-kekurangannya, ia telah banyak menelorkan tokoh-tokoh yang berpengaruh di segala lapisan. Jadi, alangkah ironisnya jika kemudian alumni pesantren, termasuk mereka yang ada di kursi DPR, tidak memedulikan status pesantren dalam sebuah Undang-undang yang mereka bikin sendiri. Ataukah memang kursi kekuasaan dapat membuat orang lupa akan masa lalunya? *Wallahu 'Alam.* □